

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan serta kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Sehingga diperlukan tolak ukur untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. Karena, hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia (Sutyanto, 2009) dalam (Zainuddin et al., 2022).

Menurut Fauzan, dkk (2020) Indeks Pembangunan Manusia merupakan cerminan dari pembangunan manusia secara menyeluruh, juga sebagai indikator yang mencerminkan sudut pandang pembangunan bukan dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan diukur dari tiga aspek kehidupan dasar. Konsep IPM pertama kali dikenalkan oleh UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996 yang kemudian terus berlanjut tiap tahunnya. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan ini terdiri dari panjang usia dan hidup sehat, pendidikan yang memadai, serta standar hidup yang layak.

UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

1. Produktifitas

Manusia harus meningkatkan produktifitas juga berpartisipasi dengan penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan

hidup. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pembangunan manusia

2. Pemerataan

Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik dan berhak mengambil manfaat yang ada dalam meningkatkan kualitas hidup tanpa terkecuali.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dipastikan harus tersedia juga untuk generasi yang akan datang, baik sumber daya fisik, manusia dan lingkungan.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan serta menentukan arah kehidupan mereka juga berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual).

Pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi untuk pembangunan bangsa. Proses untuk menyiapkan sumber daya yang berkualitas sangat penting bagi negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan

tersebut dilihat dari keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghitungan nilai IPM disusun secara terstruktur dimulai dari tingkat nasional, provinsi serta tingkat kabupaten/kota. Penyusunan secara terstruktur ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti peringkat, nilai, dan disparitas pembangunan antar daerah. Selain itu, diharapkan agar masing-masing daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan di daerah melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

2.1.1.1 Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia

Sejak IPM dirilis pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut yaitu :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ketiga dimensi tersebut merupakan acuan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator penyusun untuk mendukung metode perhitungan IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Berikut ini indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia :

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh

seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Kedua indikator ini merupakan representasi dari dimensi pengetahuan dan indikator ini merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya untuk pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki suatu wilayah.

HLS adalah lama sekolah yang diharapkan oleh anak berusia 7 tahun, sementara RLS adalah jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan berdasarkan rata-rata indeks HLS dan RLS. Nilai maksimum dan minimum HLS masing-masing adalah 18 tahun dan 0 tahun, sementara nilai maksimum dan minimum untuk RLS masing-masing adalah 15 tahun dan 0 tahun.

3. Pengeluaran Riil Per Kapita

Indikator ini mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai *output* dari kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan indeks

pengeluaran menggunakan batas nilai maksimum dan nilai minimum masing-masing Rp26.572.352 dan Rp1.007.436.

2.1.1.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum menghitung IPM, terdapat tiga indeks yang harus digunakan untuk penghitungan IPM tersebut. Berikut adalah ketiga indeks yang merupakan indikator untuk penghitungan IPM :

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah

$$I_{HLS} = \frac{RLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - RLS_{min}}$$

b. Rata-Rata Lama Sekolah

$$\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

c. Indeks Pendidikan

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{In_{(pengeluaran)} - In_{(pengeluaran_{min})}}{In_{(pengeluaran_{maks})} - In_{(pengeluaran_{min})}}$$

4. Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Indeks Pembangunan Manusia memiliki skala dari 0-100. Jika nilai Indeks Pembangunan Manusia mendekati 100, maka tingkat pembangunan manusia suatu wilayah tersebut semakin baik. Capaian IPM disuatu wilayah dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu :

1. Sangat Tinggi : ≥ 80
2. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
3. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
4. Rendah : < 60

2.1.1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Berikut ini adalah manfaat Indeks Pembangunan Manusia :

- a. IPM sebagai indikator penting mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis. Tidak hanya sebagai ukuran kinerja pemerintah, tetapi dapat digunakan sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS (2015), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah domestik di negara yang menyebabkan aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non-residen. Ada

dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berlaku dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi yaitu dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh riil tanpa dipengaruhi fluktuasi harga.

2.1.2.1 Sumber – Sumber Produk Domestik Regional Bruto

Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat PDRB yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang

memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari periode sebelumnya.

2. Tenaga kerja dan pengangguran

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat PDRB. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang serta daya beli masyarakat yang meningkat. Selain itu, dapat ditandai dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Arsyad, 2015).

2.1.2.2 Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk menghitung angka-angka PDRB, terdapat tiga pendekatan yang digunakan (Badan Pusat Statistik, 2015), yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi

tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan listrik dan gas
- e. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- h. Transportasi dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Jasa keuangan dan asuransi
- l. Real estat
- m. Jasa perusahaan
- n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- o. Jasa pendidikan
- p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- q. Jasa lainnya

Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jadi, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \{ w + r + i + p \}$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan
- w = Pendapatan bersih dari sewa
- r = Pendapatan dari upah
- i = Pendapatan dari bunga
- p = Pendapatan dari keuntungan perusahaan

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

2.1.2.3 Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto

Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2015). Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat, terutama di era digital seperti ini, internet semakin berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan TIK, maka semakin berkembang pula ketersediaan infrastruktur TIK, serta kecepatan akses terhadap internet (Badan Pusat Statistik, 2022). Berkembangnya TIK, memunculkan pertanyaan terkait kesenjangan digital antar negara, yaitu apakah kesenjangan tersebut semakin melebar atau menyempit. Pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan TIK sangat penting bagi para pengambil kebijakan. Mengingat dampak potensial dari penggunaan TIK terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta setiap negara berusaha agar TIK tersedia untuk berbagai lapisan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk membandingkan pencapaian TIK setiap negara, dan

menjadi tolok ukur penting untuk menilai daya saing regional dan global sehingga berdampak pada peningkatan pengembangan TIK di tingkat nasional. Maka disusunlah *ICT Development Index* oleh ITU (*International Technology Union*).

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indeks yang dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) di tahun 2008 dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah serta dapat menjadi pembandingan antar waktu dan wilayah serta mengukur kesenjangan digital antar wilayah dan mengukur potensi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020). Skala pengukuran indeks ini yaitu dari angka 0-10. Semakin mendekati angka 10 maka pembangunan TIK di suatu wilayah semakin baik.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan indikator TIK di Indonesia, BPS melakukan penghitungan *ICT Development Index* dengan nama Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada level nasional dan provinsi. Indeks Pembangunan TIK dirilis oleh BPS sejak tahun 2015 dengan mengacu dari metodologi ITU.

2.1.3.1 Kerangka Konsep Indeks Pembangunan TIK

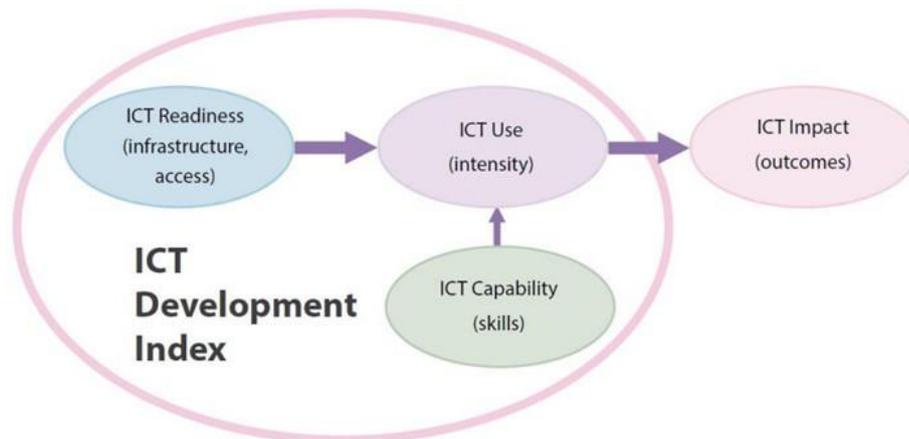
Data statistik terkait TIK digagags oleh Badan Internasional PBB melalui *Partnership on Measuring ICT for Development* yang mengembangkan Indikator Inti TIK (*Core ICT Indicator*) yang mencakup data statistik mengenai akses dan

penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu, sektor bisnis, dan sektor pendidikan. Adanya indikator TIK ini sangat bermanfaat karena dapat menggambarkan perkembangan TIK di suatu negara/wilayah.

Kerangka konseptual dari pembentukan Indeks Pembangunan TIK menggambarkan proses yang akan dilalui oleh negara-negara menuju masyarakat informasi. Kerangka konseptual ini didasarkan pada model tiga tahap yaitu:

- a. Tahap 1: Kesiapan TIK (*ICT readiness*), mencerminkan tingkat infrastruktur yang memiliki jaringan serta akses ke TIK.
- b. Tahap 2: Intensitas TIK (*ICT intensity*), mencerminkan tingkat penggunaan TIK dalam masyarakat.
- c. Tahap 3: Dampak TIK (*ICT impact*), mencerminkan hasil efisiensi dan efektivitas penggunaan TIK.

Tahap ke-1 dan tahap ke-2 merupakan dua komponen utama dari Indeks Pembangunan TIK. Untuk memaksimalkan dampak dari TIK tergantung pada komponen ketiga yaitu keahlian TIK. Tiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tanpa infrastruktur dan akses TIK maka tidak ada penggunaan TIK. Memiliki akses ke infrastruktur TIK selalu menjadi prasyarat untuk penggunaan selanjutnya. Sementara keahlian TIK diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan TIK sebaik mungkin. Gabungan ketiga komponen tersebut dapat mengukur langkah suatu negara menuju masyarakat informasi.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Indeks Pembangunan TIK

Sumber: Indeks Pembangunan TIK 2021

2.1.3.2 Indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penghitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), BPS menggunakan 11 indikator untuk menyusun nilai IP-TIK yang dibagi menjadi 3 subindeks yaitu sub-indeks akses dan infrastruktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian.

1. Sub-indeks Akses dan Infrastuktur

Menggambarkan kesiapan teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT *Readiness*) yang diukur dari sisi akses dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan lima indikator penyusun sub-indeks.

2. Sub-indeks Penggunaan

Menggambarkan intensitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT *Intensity*) yang diukur dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tiga indikator penyusun sub-indeks.

3. Sub-indeks Keahlian

Menggambarkan kemampuan atau keahlian yang dibutuhkan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tiga indikator penyusun sub-indeks.

Tabel 2.1 Indikator dan Sub-indikator IPTIK

| Komponen | Penimbang Indikator | Penimbang Sub-indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Akses dan Infrastruktur | | |
| a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk | 0,2 | |
| b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk | 0,2 | |
| c. <i>Bandwith</i> internet internasional per pengguna | | |
| d. Persentase rumah tangga dengan komputer | 0,2 | 0,4 |
| e. Persentase rumah tangga dengan akses internet | 0,2 | |
| | 0,2 | |
| Penggunaan | | |
| a. Persentase individu yang menggunakan internet | 0,33 | |
| b. Pelanggan <i>fixed broadband</i> internet per 100 penduduk | 0,33 | 0,4 |
| c. Pelanggan <i>mobile broadband</i> internet aktif per 100 penduduk | 0,33 | |
| Keahlian | | |
| a. Rata-Rata Lama Sekolah | 0,33 | |
| b. Angka Partisipasi Kasar Sekunder | 0,33 | 0,2 |
| c. Angka Partisipasi Kasar Tersier | 0,33 | |

Sumber : *International Telecommunication Union, 2016*

Langkah awal dari penghitungan nilai subindeks yaitu dengan menghitung normalisasi indikator yang termasuk dalam setiap subindeks untuk mendapatkan unit pengukuran yang sama. Nilai subindeks ini kemudian dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai tertimbang indikator yang termasuk dalam subindeks masing-masing. Untuk perhitungan indeks akhir, subindeks akses dan infrastruktur TIK serta subindeks penggunaan TIK diberi bobot masing-masing 40 persen atau

0,4. Sedangkan subindeks keahlian TIK diberi bobot 20 persen. Nilai indeks akhir kemudian dihitung dengan menjumlahkan subindeks tertimbang. Dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Berdasarkan indikator dan penimbang pada tabel 2.1 di atas, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{IP-TIK = 0,4 ACCESS + 0,4 USE + 0,2 SKILL}$$

Keterangan :

ACCESS : Sub-indeks Akses dan Infrastruktur

USE : Sub-indeks Penggunaan

SKILL : Sub-indeks Keahlian

2.1.3.3 Konsep dan Definisi Indikator Penyusun IP-TIK

Konsep dan definisi dari indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK menurut BPS adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon tetap” mengacu pada jumlah saluran telepon tetap analog yang aktif, langganan *Voice-over- Internet Protocol* (VoIP), pelanggan lokal tetap nirkabel, *Integrated Service Digital Network* setara dengan saluran suara dan telepon umum. Selain itu, mencakup semua akses melalui infrastruktur tetap (*fixed*) yang mendukung telepon suara menggunakan kabel tembaga, layanan suara menggunakan *Internet Protocol* (IP) yang disampaikan melalui

infrastruktur *fixed broadband* (misalnya *digital subscriber line/ DSL* dan serat optik), serta layanan suara yang disediakan melalui jaringan televisi kabel *coaxial* (modem kabel)

b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon seluler” mengacu pada jumlah pelanggan ke layanan telepon seluler publik yang menyediakan akses ke jaringan telepon umum yang menggunakan teknologi seluler. Ini mencakup jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar aktif selama tiga bulan sebelumnya. Tidak termasuk yang berlangganan melalui kartu data atau modem USB, berlangganan ke layanan data seluler publik, radio seluler *trunked* pribadi, *telepoint*, *paging radio*, M2M (*machine-to-machine*), dan layanan telemetri.

c. *Bandwidth* internet internasional (bit/s) per pengguna

Bandwidth merupakan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. *Bandwidth* internet internasional yang digunakan mengacu pada penggunaan rata-rata semua tautan internasional, yang digunakan oleh semua jenis operator.

d. Persentase rumah tangga dengan komputer

Istilah “komputer” mengacu pada komputer desktop, laptop, tablet atau komputer genggam sejenis. Tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi tertanam, seperti perangkat televisi pintar, atau perangkat dengan fungsi utama telepon, seperti ponsel atau *smartphone*.

Rumah tanggadengan komputer berarti komputer tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga dan bisa digunakan kapan saja.

e. Persentase rumah tangga dengan akses internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap maupun seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti internet tersedia digunakan kapan saja oleh anggota rumah tangga.

f. Persentase individu yang menggunakan internet

Individu yang menggunakan internet mengacu pada individu berusia lima tahun ke atas yang menggunakan internet tanpa mempertimbangkan lokasi, tujuan, serta perangkat dan jaringan yang digunakan dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer, ponsel, mesin *game*, televisi digital dan lainnya. Akses dapat melalui jaringan tetap atau seluler.

g. Pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk

Pelanggan *fixed broadband* internet meliputi pelanggan modem kabel, DSL, fiber ke rumah/bangunan, langganan bandwidth (kabel) tetap lainnya, broadband satelit dan broadband nirkabel tetap terrestrial.

h. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk

Pelanggan mobile broadband internet aktif merupakan jumlah pelanggan yang pernah mengakses internet melalui mobile broadband

dalam tiga bulan terakhir, termasuk langganan ke jaringan broadband seluler yang menyediakan kecepatan unduhan minimal 256 kbit/s (misalnya WCDMA, HSPA, CDMA2000 1X EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e dan LTE), dan tidak termasuk langganan yang hanya memiliki akses ke GPRS, EDGE dan CDMA 1xRTT.

i. Rata-rata lama sekolah

Merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

j. Angka Partisipasi Kasar Sekunder

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat sampai SMA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (13-18 tahun).

k. Angka Partisipasi Kasar Tersier

Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan D1 sampai dengan S1 (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (19-23 tahun).

2.1.3.4 Skala Pengukuran IP-TIK

Nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi tinggi (7,51-10), sedang (5,01-7,5), rendah (2,51-5), dan sangat rendah (0-2,5). Jika nilai Indeks Pembangunan TIK di suatu wilayah mendekati angka 10, maka pembangunan TIK di wilayah tersebut semakin baik dan pesat. Namun, jika nilai pembangunan TIK di suatu wilayah mendekati angka 0, maka pembangunan TIK di wilayah tersebut amat buruk atau lambat.

2.1.3.5 Tujuan Penghitungan Indeks Pembangunan TIK

Tujuan penghitungan Indeks Pembangunan TIK adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah.
2. Mengukur pertumbuhan pembangunan TIK di seluruh wilayah (indeks harus berlaku secara global).
3. Mengukur kesenjangan digital
4. Mengukur potensi pembangunan TIK atau pengembangannya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2004). Menurut Mankiw (2002) dalam jurnal (Ariwuni Dwi A

& Kartika N, 2019) kemiskinan adalah salah satu dari permasalahan yang sulit dilalui oleh para pembuat kebijakan.

Masyarakat miskin tidak memiliki kualitas, sehingga produktivitasnya rendah, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan yang layak. Juga memenuhi kebutuhan pokok hanya sekedar untuk merasa kenyang, tanpa memperhatikan gizi yang dibutuhkan. Sehingga kesehatan juga menurun. Orang miskin terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal disebut lingkaran setan atau *vicious circle* (Seran, 2017) dalam (Ariwuni Dwi A & Kartika N, 2019).

2.1.4.1 Macam - Macam Kemiskinan

Menurut (Suryawati, 2004) terdapat empat macam kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan pendapatan.
2. Kemiskinan absolut, merupakan kemiskinan yang terjadi karena pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mencukupi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, papan untuk meningkatkan kualitas hidup.
3. Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap kebiasaan seseorang karena faktor budaya atau adat istiadat yang tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

4. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

2.1.4.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Houghton dan Kandker (2012: 157) dalam jurnal (Rini & Sugiharti, 2017) penyebab utama atau paling tidak yang berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu:

1. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaannya.
2. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik), dan layanan seperti kesehatan serta pendidikan, kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial.
3. Karakteristik rumah tangga, mencakup ukuran rumah, rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum bekerja), gender kepala keluarga termasuk yang berusia dini, aspek ekonomi (seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki), serta aspek sosial (seperti, status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal).
4. Karakteristik individu, mencakup usia, pendidikan, status perkawinan, dan suku/daerah.

Menurut Dowling dan Valenzuela (2010: 252-253) dalam jurnal (Rini & Sugiharti, 2017), masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal

manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sedikit. Meskipun mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mereka tidak dapat memiliki kesempatan bekerja karena terdiskriminasi.

Kemiskinan merupakan suatu hal yang tak diinginkan oleh sebagian orang, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sebagian orang dihadapkan kemiskinan, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh sebagian orang (Goso & Anwar, 2017). Adapun penyebab kemiskinan menurut Hartomo dan Azis dalam Dadan Hidayana yang dikutip (Itang, 2015) yaitu:

1. Tidak adanya keinginan seseorang untuk bekerja.
2. Sumber daya alam yang tidak memadai.
3. Keterbatasan lapangan kerja.
4. Keterbatasan modal
5. Pendidikan yang rendah

2.1.4.3 Pengukuran Kemiskinan

Bank Dunia (*World Bank*) membuat indeks kemiskinan yang berlaku untuk negara berkembang. Ambang kemiskinan merupakan tingkat pemenuhan kebutuhan fisik sebanyak 2.100 kalori sehari dan dinyatakan dalam uang. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar *US\$* 1,25 perkapita per hari. Sehingga, penduduk yang dianggap miskin di dunia memiliki pengeluaran kurang dari *US\$* 1,25 per hari (Rustanto, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tolak ukur Bank Dunia (*World Bank*), yaitu rata-rata pengeluaran

perkapita penduduk dalam memenuhi 2.100 kalori per hari, ditambah kebutuhan minimum lain meliputi perumahan, pendidikan, pakaian, dan kesehatan.

2.1.4.4 Dampak Kemiskinan

Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan akan berdampak pada permasalahan serius serta dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan masyarakat (Margareni, dkk :2016) dalam jurnal (Ariwuni Dwi A & Kartika N, 2019). Kemiskinan memiliki dampak serius dari dalam berbagai hal, serta berikut ini adalah dampak kemiskinan menurut (Itang, 2015):

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu akibat dari kemiskinan yang disebabkan oleh sulitnya masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan. Selain itu, sulit bagi masyarakat dalam perkembangan serta memperoleh kerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhannya.

2. Kriminalitas

Kriminalitas merupakan efek dalam kemiskinan. Sulitnya masyarakat dalam memperoleh uang menyebabkan beberapa individu mendapatkan alternatif lain dalam memperoleh uang atau kebutuhan yang diperlukan.

3. Putus Sekolah

Mahalnya biaya pendidikan membuat orang miskin tidak mampu melanjutkan sekolah, dikarenakan keterbatasan biaya untuk membayar uang sekolah.

4. Kesehatan

Kemiskinan menyebabkan gizi sehari-hari tidak tercukupi, sehingga kualitas kesehatannya rendah, serta sulit untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang layak.

2.1.4.5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut (Prawoto, 2009), program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.
2. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.
3. Kebijakan dan program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun guncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi guncangan-guncangan tersebut.
4. Kebijakan dan program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan

peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.

5. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kemiskinan Terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2016-2021. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat serta membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

| No | Judul dan Penulis | Persamaan Variabel | Perbedaan Variabel | Hasil Penelitian |
|------------|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat | Variabel independen: - Tingkat kemiskinan Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - Jumlah penduduk - Jumlah pengangguran | - Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM - Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM - Jumlah pengangguran positif tidak |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|--|---|
| | Liza Nurmaningsih, Wahyu Hidayat Riyanto, Dwi Susilowati (2019) | | | signifikan terhadap IPM |
| 2. | Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, Gaudensia Seuk (2021) | Variabel independen: -Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Variabel dependen: -Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Inflasi - Upah Minimum Regional | - Variabel inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Regional positif tidak signifikan terhadap IPM |
| 3. | Pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Arief Rahmanda Al-Mursyid (2019) | Variabel independen: -Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Variabel dependen: -Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - PDRB | - Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM |
| 4. | Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto | Variabel independen: - PDRB | Variabel independen: - Kesenjangan Antar Daerah | - Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---|--|--|
| | (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah dan Pembiayaan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Muhammad Rifky R (2018) | Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - Pembiayaan Sektor Pendidikan | positif signifikan terhadap IPM - Kesenjangan antar daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM - Pembiayaan sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM |
| 5. | Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara Winsy A. Tarumingkeng, Vekie A. Rumate, Tri Oldy Rotinsulu (2018) | Variabel independen: - Tingkat Kemiskinan Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - Belanja Modal | - Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM - Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM |
| 6. | Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan | Variabel independen: - Jumlah Penduduk Miskin - PDRB | Variabel independen: - Tingkat pengangguran | - Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|---|--|
| | Manusia di Provinsi Banten Ihsan Maulana, Zahrani Salsabila, Deris Dermawan (2022) | Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia | | - PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan - Tingkat pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM |
| 7. | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh Zainuddin, Maryam, Cut Hamdiah, Muhammad Bakri, Jen Surya (2022) | Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal | - PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM - PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM - Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM |
| 8. | Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Kebebasan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kawasan Negara ASEAN Tahun 2014-2019 | Variabel independen: - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - Indeks Kebebasan Ekonomi | - TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Kebebasan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|---|---|
| | Riko Adi Saputra, Didi Nuryadin, Asih Sri Winarti (2022) | | | |
| 9. | Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, ICT <i>Development Index</i> , dan <i>Good Governance</i> Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Anggota ASEAN dan SAARC Kategori <i>Lower-Upper Medium</i> Albertus Surya Kristiawan, Deden Dinar Iskandar (2020) | Variabel independen: - ICT <i>Development Index</i> Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - Produk Domestik Bruto - <i>Control of corruption</i> - <i>Political stability and absence of violence or terrorism</i> - <i>Regulatory quality</i> | - Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada ASEAN dan SAARC ICT <i>Development Index</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada ASEAN dan SAARC - <i>Control of corruption</i> memiliki negatif dan tidak signifikan terhadap IPM pada ASEAN dan SAARC - <i>Regulatory quality</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada ASEAN serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada SAARC |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | <i>Enhancing ICT for Inclusive Human Development in Sub-Saharan Africa</i> Simplice A. Asongu and Sara Le Roux (2016) | Variabel independen: - ICT/IP-TIK Variabel dependen: <i>Human Development Index</i> (HDI) | Variabel independen: - PDRB | - Kebijakan yang dirancang untuk mendorong penetrasi TIK (ponsel, internet, telepon) akan meningkatkan pembangunan manusia dan dinamika TIK |
| 11. | Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, dan Rafael Purtomo Somaji (2018) | Variabel independen: - PDRB - Kemiskinan Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Variabel independen: - PAD | - Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM - PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |
| 12. | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat | Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | - PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---|--|---|
| | Mariana Naibaho dan Ulya Nabila (2021) | | | |
| 13. | Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Anindya Rahardian Nugraeni (2021) | Variabel independen: - Kemiskinan Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Rasio Ketergantungan | - Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM |
| 14. | Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita (2017) | Variabel independen: - Tingkat kemiskinan - PDRB Variabel dependen: - Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Belanja Pendidikan - Belanja Kesehatan | - Pengeluaran di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM - Pengeluaran di sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM - Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|---|--|
| | | | | - PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM |
| 15. | Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Citra Islamiatus Izzah, dan Ignatia Martha Hendarti (2021) | Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia | Variabel independen: - Tenaga Kerja Tingkat Upah | - Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap IPM - Tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM - PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia

Indikator makro ekonomi yang dapat digunakan dalam menerangkan perkembangan perekonomian suatu wilayah juga digunakan sebagai evaluasi kualitas kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan nilai PDRB. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan pemerataan pendapatan masyarakat pada suatu daerah sehingga kesejahteraan pun meningkat. Teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Yang dimaksud besarnya output perkapita adalah PDRB.

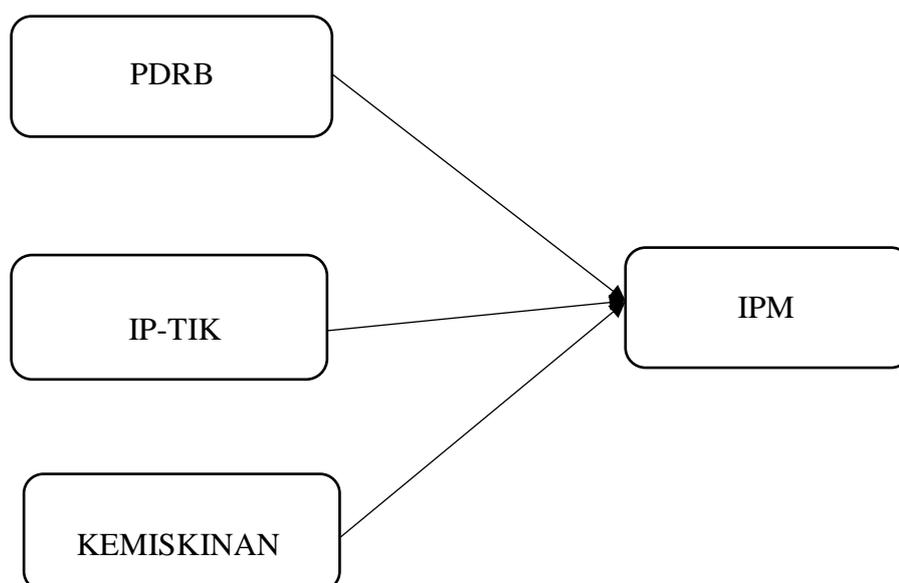
Pola konsumsi masyarakat akan menyebabkan naiknya pertumbuhan output sehingga tingkat daya beli meningkat dan berdampak pada kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (Nugraeni & Aji, 2021). Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan penelitian terdahulu (Rakhmadhani, 2018). PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hubungan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia juga berpengaruh positif signifikan sesuai dengan penelitian terdahulu (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021).

2.3.2 Hubungan IP-TIK dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di masa sekarang ini dihadapi bersama dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu memasuki era masyarakat digital termasuk di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika pemerataan infrastruktur, terutama infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi maka akan sangat memberi dampak bagi pembangunan manusia karena dapat menjadi akses untuk persebaran informasi, komunikasi, dan pembangunan ekonomi berbasis digital. Hubungan IP-TIK dengan Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa Indeks Pembangunan TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Saputra et al., 2022). Semakin baik nilai IP-TIK, maka semakin baik pula kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Selain itu juga, Indeks Pembangunan TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan penelitian terdahulu (Kristiawan, 2020).

2.3.3 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Bertambahnya populasi penduduk miskin, dapat mengurangi kesejahteraan dalam suatu wilayah. Penyebabnya adalah masyarakat miskin memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Tiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Rendahnya pendapatan, tabungan dan investasi membuat masyarakat tidak memiliki daya beli yang tinggi, karena daya beli adalah salah satu indeks komposit dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hubungan kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Nugraeni & Aji, 2021). Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Nurnaningsih et al., 2019)



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Diduga secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2016-2021.
2. Diduga secara bersama-sama PDRB, IP-TIK dan Kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2016-2021.